

SOSIALISASI PEDOMAN MCP TAHUN 2021

“MANAJEMEN ASN”

Pada 65 (ENAM PULUH LIMA) PEMERINTAH DAERAH di :

PROVINSI SUMUT, PROVINSI JAMBI,

PROVINSI BENGKULU dan PROVINSI KEPRI



STRUKTUR KELEMBAGAAN



Pimpinan



DEWAN PENGAWAS



Sekretariat Jenderal



Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat



Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring



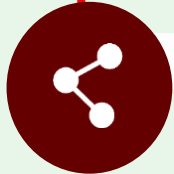
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi



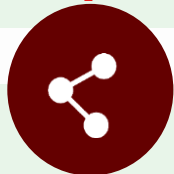
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi



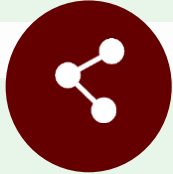
Deputi Bidang Informasi dan Data



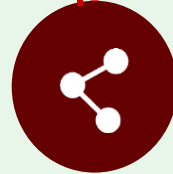
Dit Korsup I



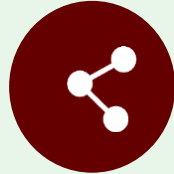
Dit Korsup II



Dit Korsup III

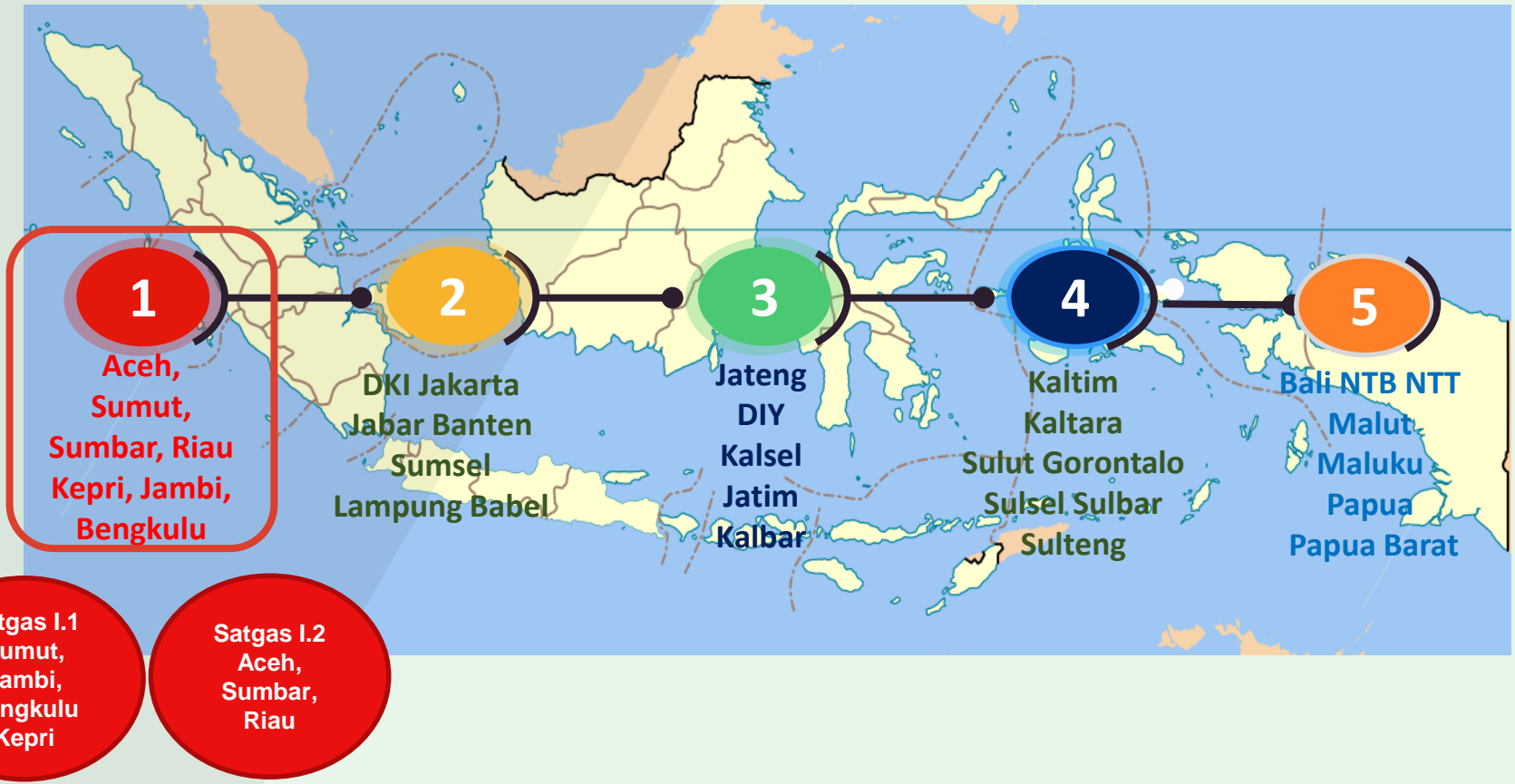


Dit Korsup IV



Dit Korsup V

WILAYAH DIREKTORAT KORSUP



Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

01

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

02

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

03

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah

04

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi

PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan BMN/BMD

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan BMD

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Penyusunan APBD 2021

05

06

07

08

SURAT KPK



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1447 /KSP.00/70-73/03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi
Pemerintah Daerah Tahun 2021

1 Maret 2021

Yth. Sekretaris Daerah terlampir
di
Tempat

Dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Pemda), bersama ini disampaikan indikator keberhasilan tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah bertanggungjawab dalam menyampaikan Laporan Pencapaian Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
2. Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan dapat disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID yang akan kami buka pada tanggal 1 April 2021. Petunjuk pelaporan dan pengisian dokumen kelengkapan kami sampaikan dalam Lampiran II.
3. Masing-masing Pemda diberikan akses masuk ke dalam aplikasi tersebut melalui Sekretaris Daerah, sehingga masing-masing Pemda hanya diberikan 1 (satu) *user ID* dan *password*.
4. Penggantian Admin MCP dilakukan dengan mengisi Formulir terlampir (Lampiran III).
5. Progress yang dicantumkan dalam aplikasi MCP Korsupgah merupakan hasil capaian Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh Pokja (Perangkat Daerah) terkait dan diketahui oleh Sekretaris Daerah bersama Pokja Pelaksana Rencana Aksi terkait.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.k.a. Pimpinan
Daerah Bidang Koordinasi dan Supervisi

Herry Muryanto

Tembusan Yth.:

1. Pimpinan KPK;
2. Inspektur KPK.

MONITORING CENTER FOR PREVENTION 2021

AREA INTERVENSI

- 8 Area Intervensi

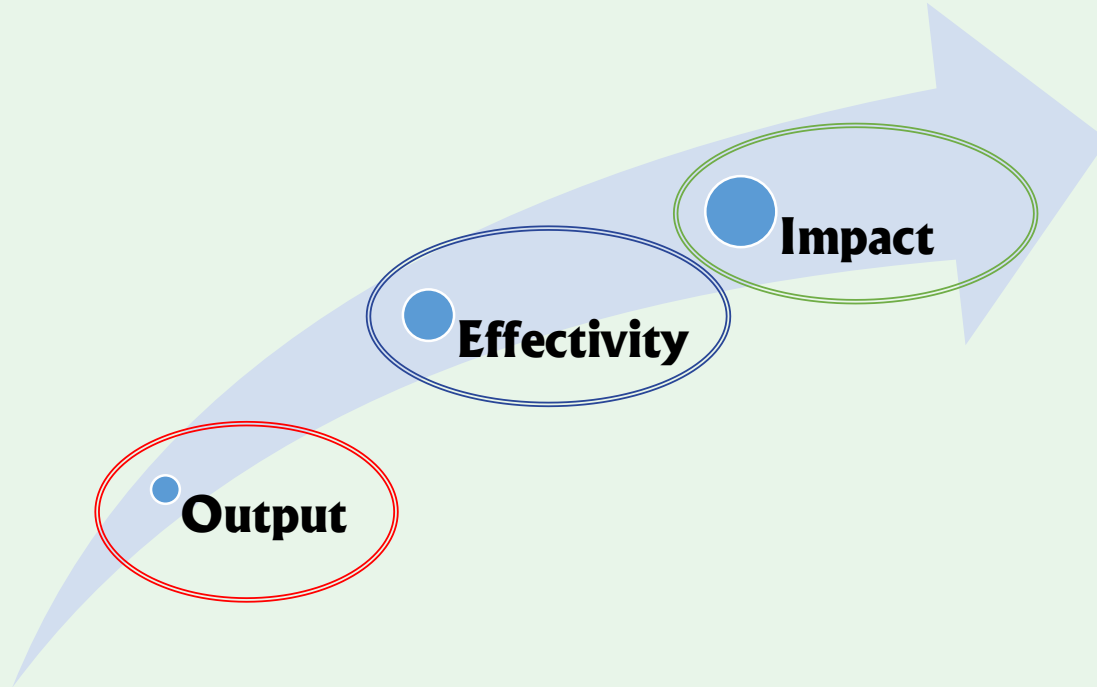
INDIKATOR

- 34 Indikator

SUB INDIKATOR

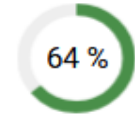
- 70 Sub Indikator

Kemanfaatan MCP



Capaian 20210

Capaian MCP Nasional



Cari instansi

No ↑	Instansi	Total
1	Pemerintah Provinsi Bali	98.57
2	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	95.47
3	Pemerintah Kabupaten Lamongan	93.20
4	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	93.00
5	Pemerintah Kabupaten Boyolali	92.48
6	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	92.31
7	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	92.24
8	Pemerintah Kota Pematang Siantar	92.14
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	91.80
10	Pemerintah Provinsi Banten	91.76

Records per page: 10 1-10 of 542

Nasional

- 2018 : 58%
- 2019 : 69%
- 2020 : 64%

0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100%

highcharts.com

Progres Keberhasilan Nasional

Perencanaan dan Penganggaran APBD

71.5 %

Pengadaan Barang dan Jasa

62.1 %

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

67.4 %

APIP

63.7 %

Manajemen ASN

68.6 %

Optimalisasi Pajak Daerah

47.6 %

Manajemen Aset Daerah

58.0 %

Tata Kelola Dana Desa

59.7 %

FOKUS PENCEGAHAN 2021

01

Perencanaan & Penganggaran
APBD



02

Pengadaan Barang dan Jasa



03

Perizinan



04

APIP



05

Manajemen ASN



06

Optimalisasi Pajak Daerah



07

Manajemen Aset Daerah



08

Tata Kelola Dana Desa



TANTANGAN KITA

Rabu 23 Desember 2020, 01:55 WIB

90% Kepala Daerah Korupsi karena Utang ke Sponsor

Cahya Mulyana | **Pilkada**

<https://mediaindonesia.com/pilkada/371090/90-kepala-daerah-korupsi-karena-utang-ke-sponsor>

NASIONAL / HUKUM

Bupati Malang Rendra korupsi untuk bayar utang kampanye

itik Bupati

Kamis, 11 Oktober 2018 / 22:52 WIB

<https://nasional.kontan.co.id/news/bupati-malang-rendra-korupsi-untuk-bayar-utang-kampanye>



Daerah

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Daddy Rohanady menilai OTT Bupati Indramayu oleh KPK dampak dari mahalnnya ongkos kampanye saat Pilkada

<https://www.tagar.id/diduga-akibat-hutang-politik-bupati-indramayu-ott-kpk>

TANTANGAN UTAMA

Home > News > Nasional

Ketua KPK: Praktik Jual Beli Jabatan Kita Sikat

Rabu 14 Apr 2021 05:21 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan



<https://www.republika.co.id/berita/grira7354/ketua-kpk-praktik-jual-beli-jabatan-kita-sikat>

Oleh NIA DAN IAN

1 Agustus 2019 04:02 WIB · 1 menit baca



detikNews > Berita

KPK soal Penyebab Jual Beli Jabatan di Daerah: Merasa Tak Diawasi

Haris Fadhil - detikNews

Rabu, 31 Jul 2019 18:51 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4647131/kpk-soal-penyebab-jual-beli-jabatan-di-daerah-merasa-tak-diawasi>

detikNews > Berita

OTT Bupati Kudus, KPK Duga Terkait 'Jual-Beli' Jabatan

Ibnu Hariyanto, Dhani Irawan - detikNews

Jumat, 26 Jul 2019 16:59 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4640764/ott-bupati-kudus-kpk-duga-terkait-jual-beli-jabatan>



HOME NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL HUMANIORA INFO CEK FAKTA

Home • Kabar24 • Hukum

Ketum PPP Kena OTT, Dugaannya Terkait Jual Beli Jabatan di Lingkungan Kanwil Kemenag

operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus jual beli

[r24.bisnis.com/read/20190315/16/900176/ketum-ppp-kena-ott-dugaannya-terkait-jual-beli-lingkungan-kanwil-kemenag](https://bisnis.com/read/20190315/16/900176/ketum-ppp-kena-ott-dugaannya-terkait-jual-beli-lingkungan-kanwil-kemenag)

Home / News / Regional

Bupati Klaten Akui Terima Uang Suap Jual Beli Jabatan

Kompas.com - 16/08/2017, 16:08 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2017/08/16/16084271/bupati-klaten-akui-terima-uang-suap-jual-beli-jabatan>

MANAJEMEN ASN

1 Regulasi

- Perkada
- SK Kada

2 Sistem Informasi

- Sistem Informasi Manajemen ASN

3 Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

- Kepatuhan LHKPN
- Pengendalian Gratifikasi

4 Tata Kelola

- Evaluasi Jabatan
- Tambahan Penghasilan Pegawai
- Promosi, Rotasi, Mutasi
- Manajemen Kinerja

5 Pengawasan

- Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN
- Evaluasi Benturan Kepentingan

1. REGULASI MANAGEMEN ASN

Perkada tentang:

- Evaluasi Jabatan
- Tambahan penghasilan pegawai (TPP)
- Pelaporan LHKPN
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- Benturan Kepentingan
- Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana)

1. REGULASI MANAGEMEN ASN

Perkada tentang:

- Pedoman manajemen talenta
- Sistem pola karir/Pembinaan Karir
- Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi
- Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui *talent pool* dan rencana suksesi
- Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
- Tata Cara Penegakan Disiplin ASN

SK Kepala Daerah tentang:

1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan
2. Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN
3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

2. SISTEM INFORMASI

Pemda menyusun Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai;

Adanya aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan:

1. Pelaporan aktivitas harian ASN
2. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung
3. Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja

3. Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

Pemda melaksanakan Bimtek Pengisian LHKPN untuk dapat mendukung tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN

1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif
2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif

3. Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

Pemda melaksanakan Sosialisasi Regulasi Gratifikasi dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi

1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi yang mencakup: Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Waktu Pelaksanaan, Pelaksana, Peserta, Dokumentasi, Penutup
2. Pelaporan Gratifikasi

4. TATAKELOLA SDM

a. Evaluasi Jabatan

1. Pemda menyusun evaluasi jabatan untuk seluruh OPD
2. Pemda meminta validasi hasil evaluasi jabatan kepada
KemenPAN RB

Output :

1. Nilai dan Kelas Jabatan pada seluruh OPD
2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan
3. Peta Jabatan seluruh OPD

4. TATAKELOLA SDM

b. Tambahan Penghasilan Pengawai

1. Pemda menyusun regulasi implementasi TPP yang memperhatikan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst
2. TPP mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR

4. TATAKELOLA SDM

C. Promosi, Rotasi dan Mutasi

Pemda menyusun:

1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka;
2. Menginput data dan informasi setiap tahapan pengisian JPT secara lengkap dalam Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI);
3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT; dan
4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi)

4. TATAKELOLA SDM

D. Manajemen Kinerja

Pemda menyusun:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT)
2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan
3. Hasil penilaian kinerja (minimal tiap semester)
4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan)

5. Pengawasan

a. Reviu atas rotasi, Promosi dan Mutasi ASN

1. Inspektorat melakukan reviu atas promosi, rotasi, dan mutasi ASN
2. Dalam melakukan reviu atas promosi, rotasi, dan mutasi ASN, Inspektorat melakukan evaluasi apakah proses tersebut sudah memenuhi kualifikasi baik dari sisi administrasi maupun teknis.

5. Pengawasan

a. Evaluasi Benturan kepentingan

1. BKD melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Benturan
Kepentingan

2. Inspektorat melaksanakan Evaluasi Benturan Kepentingan

MONITORING PTDH

- ❖ Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* karena **melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**
- ❖ Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* karena **melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana**



TERIMA KASIH

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

Informasi LHKPN:

Email : elhkpn@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Hubungan Masyarakat:

Email: informasi@kpk.go.id